

© 2004 Sekolah Pasca Sarjana IPB
Makalah Kelompok V
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS 702)
Program Pascasarjana/ S3, Institut Pertanian Bogor
Oktober 2004

Posted 24 November 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (Penanggung Jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr. Ir. Hardjanto, MS

DAMPAK URBANISASI TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI WILAYAH DKI JAKARTA

Oleh :

Kelompok V, PSL

anggota :

Djadid Assagaf	P062040071
Charlena	P062040101
Cut Irsanya Nilam Sari	P062024011
Debby V Pattimahu	P062040061
Dwi Dinariana	P062040081
Hutwan Syarifuddin	P062040031
Joko Windarto	P062040111
Mukhlas Ansori	P062040011
Ngudiantoro	P062040041
Putu Wigena	P062040161
Ruli Basuni	P062040171
Sjaifuddin	P062040021
Soesilo Wibowo	P062040131
Zakiyah	P062040151

Abstrak

Urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses penambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau proses transformasi suatu wilayah berkarakter rural menjadi urban. Ia terjadi karena adanya faktor “pendorong” dan “penarik” (*Push en pull factoren*). Pembangunan yang berkembang pesat di DKI Jakarta menjadi

“penarik” bagi penduduk wilayah-wilayah lain menuju DKI Jakarta. Sementara “pendapatan masyarakat desa” sebagai faktor pendoeong. Besarnya jumlah penduduk yang migrasi menjadikan mereka bagian penting dalam pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk DKI Jakarta. Lebih lanjut dengan keterbatasan daya dukung DKI Jakarta, pertumbuhan penduduk nampaknya berdampak pada penyediaan fasilitas perumahan dan permukiman penduduk itu sendiri. Keterbatasan perumahan yang terseia dan rendahnya pendapatan bagi sebagian migran perumahan ditambah kurang memadainya pendidikan, menjadion rumah tangga tinggal di rumah yang belum layak huni dan tinggal di lingkungan kumuh. Dampak lain, terjadinya perkembangan kota yang ditumbuhi perumahan liar. Pemerintah dan masyarakat perlu secara bersama-sama memecahkan persoalan yang tengah dihadapi.

Kata Kunci : Urbanisasi , Migrasi , Penduduk , Perumahan , Permukiman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

DKI Jakarta memiliki daya tarik luar biasa bagi sebagian penduduk perdesaan. Dengan kelengkapan infrastrukturnya, menjadikan kota metropolitan ini memiliki kekuatan ekonomi, pertumbuhan industri dan perdagangan, pengembangan sumberdaya manusia, lokasi lintas bisnis internasional yang memadai, dan peluang pekerjaan yang lebih luas dan beragam. Di lain pihak, kondisi perdesaan di Indonesia secara umum masih menyimpan sejumlah permasalahan seperti kemiskinan, penambahan penduduk yang sulit dikendalikan, tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor penarik dan pendorong di atas menyebabkan terjadinya urbanisasi atau permindahan penduduk dari wilayah lain (desa) menuju wilayah DKI Jakarta untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Perpindahan penduduk dari wilayah lain ke DKI Jakarta yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu faktor yang memberi peran dalam penambahan jumlah penduduk DKI Jakarta, disamping adanya proses alam karena perbaikan besar dalam pemeliharaan kesehatan. Penduduk Jakarta hanya berjumlah 533.000 jiwa pada tahun 1930, kemudian tahun 2002 meningkat menjadi 8.37.083 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah yang memiliki luas 661,52 km² ini, tentu saja membutuhkan lahan yang lebih besar untuk sarana permukiman dan sarana penunjangnya seperti pendidikan, peribadatan, pasar, olah raga, perdagangan, perkantoran, taman dan lain-lain. Rendahnya persentase peningkatan lahan permukiman dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan

makin banyaknya permukiman yang menggunakan lahan sempit, mengubah fungsi lahan dan menggunakan ruang terbuka hijau.

Di sisi lain penduduk yang bermigrasi dari desa ke Jakarta sebagian masih berkarakter *rural*. Padahal fenomena jenis aktivitas/pekerjaan di Jakarta cenderung memerlukan tenaga kerja non pertanian yang berorientasi pada efisiensi dan kompetensi yang relatif tinggi. Ini dapat kita lihat dari peta sebaran kompetensi penduduk Indonesia yang masih berbentuk pola kerucut dengan proporsi pendidikan rendah/menengah sebagai peringkat terbesar. Hal tersebut membawa implikasi terhadap tingginya pengangguran atau rendahnya perolehan pendapatan penduduk untuk memenuhi *basic need* mereka. Rendahnya kemampuan daya beli ini membawa implikasi yang jauh yaitu dapat menimbulkan perumahan kumuh dan penurunan tingkat pelayanan prasarana lingkungan hidup perkotaan.

Nampaknya persoalan urbanisasi tidak dapat diabaikan. Urbanisasi sendiri mungkin merupakan dampak yang timbul akibat kebijakan dan perencanaan wilayah yang kurang tepat atau belum tuntasnya suatu pekerjaan jangka panjang. Tentunya hal ini menuntut propinsi DKI Jakarta yang menjadi salah satu kota tujuan migran untuk terus melakukan pembenahan di segala bidang secara berkelanjutan dan mampu membawa masyarakatnya berkarakter perkotaan. Kondisi perumahan dan permukiman adalah salah satu bidang yang perlu ditangani berkaitan dengan dampak urbanisasi, karena perumahan dan permukiman memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta merupakan pengejawantahan jati diri. Untuk itulah tulisan ini mengambil fokus kajian dampak urbanisasi dikaitkan dengan aspek perumahan dan permukiman yang layak.

1.2 Tujuan

- Melakukan kajian urbanisasi, dampak dan penanganannya terhadap permasalahan perumahan dan permukiman .
- Memberi masukan kepada pengambil keputusan maupun perencana pembangunan berkelanjutan DKI Jakarta.

II. KERANGKA KONSEP

2.1 Urbanisasi

Sebenarnya proses urbanisasi telah berlangsung cukup lama sekitar 3500 tahun sebelum Masehi, akan tetapi proses urbanisasi berjalan lambat. Urbanisasi berskala secara luas baru sekitar tahun 1800 sesudah revolusi industri yang diiringi tumbuhnya kota industri modern dengan ciri antara lain memiliki teknologi yang

cukup maju dan organisasi sosial yang kompleks. Urbanisasi dalam pandangan umum diartikan sebagai permindahan penduduk dari desa ke kota. J.H. De Goede dalam buku Modernisasi mengatakan urbanisasi sebagai suatu proses yang membawa bagian yang semakin besar dari penduduk sesuatu negara untuk berdiam di pusat pusat perkotaan. De Goede juga mengungkapkan bahwa gejala pertumbuhan kota tidak selalu menunjukkan terjadinya urbanisasi, bila tambahan penduduk di desa-desa sebanding dengan pertumbuhan penduduk di kota.

Urbanisasi dapat diartikan sebagai proses penambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan (urban) ataupun proses transformasi suatu wilayah berkarakter pedesaan (rural) menjadi urban. Urban menunjukkan suatu karakter wilayah yang padat penduduk serta fungsi-fungsi perekonomian yang heterogen (jasa, manufaktur, dll) dan berskala besar. Sedangkan kata rural dimaknai suatu karakter wilayah yang sepi penduduk dengan fungsi-fungsi perekonomian yang didominasi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta aktivitas berbasis agro lainnya (<http://www.ar.itb.ac.id>, visited 11/11/2004). Perspektif ilmu pengetahuan sosial melihat urbanisasi sebagai tambahan proses-proses yang bersifat kekotaan. Wiraatmaja (1986) berpendapat bahwa urbanisasi merupakan suatu peristiwa sosial dan banyak mempengaruhi perubahan sosial.

Urbanisasi dapat terjadi karena ketimpangan pendapatan kota dan desa akibat kebijakan yang lebih mengutamakan pembangunan kota dibandingkan pembangunan pedesaan terutama sektor pertanian. Dalam hal ini adanya faktor “pendorong” dan “penarik”. Faktor pendorongnya adalah ketimpangan pendapatan masyarakat desa dan kota. Faktor penarik berasal dari kota yaitu daya tarik ekonomi, fasilitas yang lebih baik (pendidikan, hiburan) dan citra. Reksohadiprodjo dan Karseno (1994) menyebutkan 7 motif orang desa pindah ke kota) adalah karena (1) melanjutkan pendidikan; (2) terpengaruh oleh informasi bahwa di kota lebih mudah mencari kerja atau terbuka kesempatan berusaha (3) tingkat upah relatif lebih tinggi di kota (4) keamanan (5) kebebasan pribadi lebih luas di kota (6) hiburan lebih banyak (7) adat atau agama lebih longgar di kota.

Nampaknya kehidupan di kota dianggap dapat memberikan perubahan atau solusi atas masalah yang mereka hadapi. Anggapan tersebut bisa benar bila pertumbuhan kota seiring dengan ketersediaan fasilitas seperti lapangan kerja, pembangunan perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan kata lain terjadi suatu urbanisasi yang ideal. Fakta yang ada adalah laju urbanisasi lebih cepat dari penyediaan fasilitas. Syahrir (1995) mengatakan bahwa ketika perkembangan kota semakin pesat, urbanisasi terus berlangsung menyebabkan kota tidak lagi mampu menyediakan pelayanan perumahan, sanitasi, kesehatan, transportasi yang memadai bagi penduduknya.

Perpindahan penduduk memang tidak selalu berarti negatif. Penduduk yang datang merupakan sumberdaya manusia dengan segenap potensi yang dimiliki. Mereka dapat bergerak dan digerakkan untuk mengisi pembangunan kota. Yang perlu dicermati adalah bila penduduk yang bermigrasi tidak memiliki kemampuan dan beradaptasi dengan lingkungan perkotaan. Rendahnya tingkat pendidikan

membatasi mereka untuk memperoleh lapangan kerja yang menuntut keterampilan yang lebih tinggi. Akibatnya mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Urbanisasi yang demikian akan mendatangkan persoalan bagi kota tujuan migran. B.N Marbun (1994) menyatakan faktor urbanisasi acapkali membuat persoalan karena tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, prasarana tempat tinggal yang akibatnya semakin bertambahnya jumlah orang miskin permanen sebagai lingkaran setan yang tiada akhir.

2.2 Perumahan dan permukiman

Perumahan dan permukiman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri (Indris AA, 2004). Hunian merupakan kebutuhan dasar manusia dan sebagai hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (*Shellder for All*) sebagaimana dinyatakan dalam Agenda Habitat (Deklarasi Istambul) yang telah juga disepakati Indonesia. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan pemukimannya terlihat jelas bahwa kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman di mana masyarakat tinggal menempatinya (Djoko Kirmanto, 25 Maret 2002).

Agenda 21 Rio de Janeiro tahun 1992 mengartikan pembangunan permukiman secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Untuk itu perlu disiapkan tempat tinggal yang layak bagi semua, perlu terus diperbaiki cara mengelola permukiman, mengatur penggunaan tanah untuk permukiman, meningkatkan prasarana permukiman, menjamin ketersediaan transportasi dan energi, dan juga perlu dikembangkan industri konstruksi yang mendukung pembangunan serta pemeliharaan permukiman. Selain itu di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus mengedepankan strategi pemberdayaan (*enabling strategy*).

Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, merumuskan bahwa : Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pendekatan yang dilakukan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah :

Pertama : Berdasarkan azas Tridaya yang bertujuan mendayagunakan komponen masyarakat, usaha, ekonomi dan prasarana dan sarana lingkungannya. Dalam pendekatan ini kegiatan penyiapan masyarakat, pemberdayaan kegiatan usaha

ekonomi komunitas, dan pendayagunaan sarana dan prasarana lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kedua : Pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Pembangunan perlu mempertimbangkan kelestarian dan keseraian lingkungan dan keseimbangan sumberdaya yang ada dan daya dukungnya sejak tahap perencanaan, pengelolaan dan pengembangannya. Sehingga tumbuh selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Ketiga: Penyelenggaraan secara multisektoral dan terdesentralisasi. Karena pembangunan perumahan dan permukiman mencakup begitu banyak aktivitas, maka koordinasi dengan bidang terkait perlu dilakukan.

Keempat : Pembangunan berwawasan kesehatan. Kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang menghuninya. Selain itu juga sangat mendukung upaya penanganan permukiman kumuh dan upaya pencegahan terjadinya permukiman yang tidak sehat.

Kelima : Pengembangan sistem intensif. Mendorong berbagai pihak baik formal maupun informal untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraannya.

2.3 Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Menyadari bahwa masalah hunian adalah kebutuhan dasar manusia dan hak setiap orang untuk menempati hunian yang layak, terciptanya kota terbebas dari permukiman kumuh, dan perlunya keterlibatan segenap stakeholder dalam pembangunan, maka DKI Jakarta menetapkan pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman. Adapun pokok-pokok kebijakan, Strategi dan Pola pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman yang diperoleh dari website Bapedalda (*visited 11 Nopember 2004*) sebagai berikut :

Pokok-pokok Kebijakan Publik dalam Perumahan dan Permukiman

1. Perumahan merupakan pencermnan jati diri manusia, pembentukan watak dan kepribadian.
2. Memperkecil kerawanan sosial melalui ; lingkungan perumahan yang membaaur dari berbagai status sosial, profesi, tingkat ekonomi dengan dilandasi rasa Kekeluargaan.
3. Berbasis pada komunitas (Community based development)

4. Program Utama : Program perumahan rakyat, Program penyediaan air bersih, Program penyehatan lingkungan permukiman.
5. Program Sektor : Penyediaan rumah sederhana, perbaikan kampung, peremajaan kawasan perumahan kota, pemugaran perumahan desa serta nelayan, penataan bangunan, penunjang program perumahan rakyat.
6. Berdasarkan keterjangkauan, berkelanjutan dan berwasasan kelestarian lingkungan hidup.
7. Komposisi penyediaan perumahan dengan perbandingan 6:3:1, yaitu 6 rumah murah, 3 rumah sedang, dan 1 rumah mewah.

Strategi Pengembangan Perumahan

1. Urban Betterment pada daerah perkampungan
2. Urban renewal pada daerah permukiman kumuh (dikembangkan perumahan campuran untuk daerah komersil dan rumah susun murah)
3. Relocation and resettlement untuk masyarakat miskin dari daerah/lingkungan berbahaya ke rumah susun murah.
4. Mengembangkan rumah susun di Timur dan Barat Jakarta dan perumahan intensitas tinggi di Utara Jakarta (daerah reklamasi)

Area Pembangunan Perumahan: 44,19 % (29,230 Ha)

Pembagian Status Perumahan berdasarkan kategori : Area Perumahan Terencana dan Tidak terencana.

Area Perumahan Terencana : pembangunan perumahan oleh pemerintah, developer/perumahan real estat, dan pembangunan perumahan secara perorangan.
Area Perumahan Tidak Terencana : pembangunan perumahan di pusat aktivitas ekonomi, daerah pemukiman kumuh dan perkampungan

Pola Pengembangan Permukiman: mengacu pada jumlah dan persebaran penduduk, tata guna tanah, wilayah pengembangan, dan tipologi kawasan.

2.4 Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Agenda 21 DKI Jakarta

Strategi pengembangan perumahan dan permukiman melalui Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Agenda 21 DKI Jakarta disusun melalui beberapa sub program sebagai berikut:

a. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan upaya bagi penyediaan perumahan & permukiman yang sehat dan terjangkau serta berkelanjutan
2. Menerapkan dan mengembangkan teknologi penyediaan perumahan yang aman dan sesuai dengan kondisi lingkungan sosial setempat.
3. Data dan informasi perlu terus dikembangkan untuk kemudian dibentuk suatu pangkalan data tentang sumber daya air, ketersediaan serta kondisi penggunaannya.
4. Meningkatkan sistem informasi pembangunan permukiman secara berkelanjutan.
5. Memperjelas strategi kemitraan antara sektor publik, swasta dan masyarakat serta elemen stakeholder lainnya.

b. Pengelolaan Perumahan dan Permukiman:

1. Mengevaluasi keberadaan berbagai lembaga/organisasi di sektor publik, swasta dan masyarakat yang terkait dengan pengelolaan prasarana dasar.
2. Mengembangkan mekanisme pengelolaan permukiman.
3. Meningkatkan fungsi, peran dan kemampuan lembaga pemerintahan yang telah ada dalam usaha Pemeliharaan lingkungan permukiman.
4. Mengembangkan azas wilayah dalam pemeliharaan prasarana- sarana permukiman.
5. Pembangunan perumahan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kondisi kawasan antara lain: pembangunan baru, pemugaran, pemeliharaan lingkungan, perbaikan lingkungan dan peremajaan.
Pembangunan perumahan melalui berbagai program dilakukan secara parallel yang disesuaikan dengan kondisi kawasan, yaitu melalui pembangunan baru pada areal-areal kosong, pemugaran terhadap pembangunan dan lingkungan perumahan bersejarah atau berciri khas budaya tertentu. Pemeliharaan lingkungan terhadap kawasan perumahan yang sudah relatif baik, perbaikan lingkungan kawasan perumahan kampung dan kumuh kategori sedang dan ringan, peremajaan kawasan perumahan kumuh kategori berat, serta penertiban kawasan perumahan illegal.
6. Pembangunan rumah susun murah/ sederhana pada kawasan perumahan kumuh sedang dan berat.

Pembangunan rumah susun murah/ sederhana dilakukan pada kawasan perumahan yang terletak berdekatan atau berada didalam kawasan ekonomi prospektif. Pembangunan rumah susun sederhana yang dikaitkan dengan peremajaan pada kawasan perumahan kumuh kategori berat diprioritaskan pada kawasan yang terletak dibagian dalam dan sekitar jaringan jalan lingkaran dalam serta yang berada dibagian luar tetapi memiliki akses tinggi terhadap

jaringan jalan arteri tersebut. Selain itu, pembangunan rumah susun juga dilakukan pada kawasan perumahan yang terletak berdekatan atau berada didalam kawasan ekonomi prospektif. Diupayakan pula kebijakan pengendalian nilai lahan dan bangunan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.

7. Pembatasan pembangunan perumahan pada kawasan konservasi atau kawasan resapan air. Peremajaan kawasan perumahan kumuh dalam rangka penataan DAS 13 sungai di Wilayah Pembangunan Tengah dan Wilayah Pembangunan Utara dilakukan dengan penyediaan rumah susun yang melibatkan peran serta swasta. Pengembangan perumahan pada daerah-daerah yang berfungsi konservasi, diarahkan dengan pembangunan secara kolektif dalam bentuk rumah susun dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) rendah perkawasan

III. PEMBAHASAN

3.1. Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Kota Jakarta terletak antara $6^{\circ}12'$ Lintang Selatan, $106^{\circ}48'$ Bujur Timur dan 7 M diatas Permukaan Laut. Propinsi yang memiliki luas area $661,52 \text{ Km}^2$ dengan kepadatan penduduk $13.006 \text{ jiwa/ Km}^2$ ini merupakan salah satu kota besar yang memiliki daya tarik bagi penduduk daerah untuk bermigrasi, selain memang DKI Jakarta memiliki keunikan sebagai Ibukota Negara Indonesia. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 1930 sebanyak 533.000 jiwa, meningkat menjadi 8,4 juta jiwa pada tahun 2000.

Berdasarkan hasil sensus penduduk Propinsi DKI Jakarta mulai tahun (1930 - 2000), kenaikan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta,
1930 s/d tahun 2000.

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (per km^2)	Tingkat pertumbuhan (%) per tahun
1	1930	533.000	-	-
2	1961	2,973 juta	5.152	-
3	1971	4,579 juta	7.936	4,41

4	1980	6,503juta	9.335	3,97
5	1990	8,222 juta	12.642	2,37
6	2000	8,4 Juta	13.006	2,09

Sumber : Disajikan penulis yang diambil dari berbagai sumber

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 70 tahun yaitu dari tahun 1930 – 2000 jumlah penduduk Jakarta telah mencapai 15 kali lipat. Walaupun demikian prosentasi penambahan penduduk cenderung semakin menurun. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada kurun waktu 1960 - 1971 penambahan penduduk DKI Jakarta mencapai angka 4,4 % per tahun, kemudian tahun 1980 – 2000 pertumbuhan penduduk rata-rata hanya mencapai 2,09 % per tahun.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada awal tahun 1960 hingga 1970 berkaitan dengan proses percepatan pembangunan yang terpusat pada kota ini sebagai Ibu Kota Negara. Hal ini juga yang memicu migrasi penduduk dari daerah lain ke wilayah DKI Jakarta. Hugo (1979) menyatakan bahwa migrasi ini menjadi faktor penting pertumbuhan dan komposisi penduduk Jakarta setelah kemerdekaan. Selain itu nilai TFR DKI Jakarta mencapai 5,18 yang dapat mengindikasikan tingkat kelahiran cukup tinggi pada kurun waktu tersebut. Sedangkan penurunan pertumbuhan penduduk (1980 –2000) disebabkan adanya program berencana dan pengembangan wilayah JABOTABEK yang berimplikasi terjadinya penyebaran penduduk ke wilayah perbatasan Jakarta tersebut.

Penduduk Jakarta ditinjau dari aspek struktur penduduk berasal dari berbagai etnis baik pribumi maupun non pribumi, seperti terlihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Persentase Struktur Penduduk Jakarta berdasarkan Asal Etnis
Pada Tahun 1930 dan 1961 (dalam %).

Suku Bangsa	Tahun 1930	Tahun 1961
Pribumi:		
• Jakarta asli	53,4	22,6
• Sunda	19,1	32,8
• Jawa-Madura	7,6	25,4
• Batak	0,2	1,0
• Minangkabau	0,4	2,1
• Sumatra Selatan	0,1	1,2
• Sulawesi Utara	0,,5	0,7
• Maluku& Irian	0,3	0,4
• Melayu	0,7	0,7
• Aceh	-	0,2
• Banjar	-	0,2
• Sulawesi Selatan	-	0,6

• NTT	0,9	0,2
• NTB	-	-
• Bali	-	0,1
• Takdiketahui	-	1,3
Nonpribumi:		
• Cina	11,2	10,1
• Lainnya	5,6	0,4

Sumber: Castle (1967) dalam Hugo, (1979) .

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan adanya migrasi penduduk dari berbagai etnis wilayah Indonesia menuju DKI Jakarta. Nampak terlihat pergeseran prosentase jumlah penduduk. Prosentase penduduk Jakarta Asli (Betawi) pada tahun 1930 sebanyak 53 % kemudian pada tahun 1961 menjadi sekitar 22,6 %. Sementara terjadi kenaikan prosentase jumlah penduduk dari Sunda, Jawa dan Madura dengan jumlah yang cukup berarti. Migran yang berasal dari Sunda menduduki urutan tertinggi yaitu sebanyak 32,8 %, disusul migran asal Jawa-Madura sebesar 25,4 %. Kelompok penduduk yang berasal dari non pribumi, etnis Cina berada pada urutan pertama yaitu 11,2 % pada tahun 1930, dan 10,1 % pada tahun 1961.

Yang menarik dari struktur penduduk di atas bahwa perpindahan penduduk ke wilayah Jakarta sebenarnya telah terjadi sebelum kemerdekaan. Hal tersebut dapat menunjukkan perpindahan penduduk ke Jakarta tidak menimbulkan persoalan sosial budaya. Budaya menghormati tamu penduduk Jakarta dan kondisi sosial yang tidak jauh berbeda menyebabkan para migran mudah beradaptasi. Terciptanya interaksi dan proses transformasi dalam keheterogenan etnis penduduk Jakarta memberi nilai tambah bagi DKI Jakarta. Pengelolaan keheterogenan secara tepat dapat memberikan sinergi yang besar bagi pembangunan.

Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperoleh dari hasil kegiatan berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, utility, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa, Perkembangan Pendapatan DKI Jakarta dari berbagai sektor (1975 – 1989) dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Distribusi GDP berbagai Sektor di DKI Jakarta

Sektor	1975	1980	1985	1989
Pertanian	2.1	1.4	1.2	1.3
Pertambangan	0.0	0.0	0.0	0.0
Manufaktur	11.1	18.4	18.3	22.1
Utility	1.8	1.5	3.9	4.2
Konstruksi	4.4	4,6	8.0	7,6

Perdagangan	47,8	27,9	23,5	21,1
Transportasi	7,6	8,8	10,3	11,1
Keuangan	12,0	19,9	23,8	23,0
Jasa	13,2	17,5	11,1	9,5
Oil/gas GDP	0,0	0,0	0,0	0,0
Non oil/gas GDP	100	100	100	100
Jumlah Total GDP	100	100	100	100

Sumber : www.unu.edu/unupree/unubooks/uu11ee/uu11ee15.htm, visited 5 Nopember 2004

Tabel 3 memberi gambaran aktivitas-aktivitas ekonomi di DKI Jakarta. Dari struktur dan besarnya pendapatan DKI Jakarta memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi sekunder dan tersier seperti manufaktur, utility, perdagangan, keuangan, transportasi dan jasa lebih berkontribusi. Sebaliknya, sektor pertanian memberi kontribusi yang kecil.

Aktivitas ekonomi DKI Jakarta di atas juga memperlihatkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan termasuk kompetensi yang perlu dimiliki oleh seseorang/tenaga kerja. Sektor tersebut menuntut keterampilan tertentu dan berorientasi pada efisiensi serta kualitas. Peluang pekerjaan inilah sering berbenturan dengan kemampuan para migran yang umumnya berpendidikan rendah. Akibatnya peluang untuk memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik tetap semakin kecil.

Pertumbuhan pendapatan di DKI Jakarta sebagaimana kita lihat pada tabel 3 di atas, tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan penduduk Jakarta. Distribusi dan peredaran keuangan masih didominasi oleh kelompok penduduk yang memiliki kemudahan akses. DKI Jakarta yang berpenduduk sekitar 8,4 juta jiwa tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Data yang diperoleh dari BPS memperlihatkan adanya sebaran rumahtangga dan penduduk miskin di DKI Jakarta walaupun dengan indikasi adanya penurunan. Adapun sebaran rumahtangga dan penduduk miskin di DKI Jakarta menurut Kotamadya dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Rumahtangga dan Penduduk Miskin di DKI Jakarta Menurut Kotamadya

Kotamadya	Total Penduduk	Total Ruta	Tahun 2000		Tanun 2002	
			Ruta Miskin	Penduduk Miskin	Ruta Miskin	Penduduk Miskin
Kepulauan seribu	17.245	4.221	438	1.811	568	2.297
Jakarta Selatan	1.784.044	462.238	11.573	41.447	9.517	31.887
Jakarta	2.347.917	613.034	17.291	60.883	16.004	59.356

Timur						
Jakarta Pusat	874.595	245.826	12.121	43.301	9.621	35.872
Jakarta Barat	1.904.191	511.425	22.803	78.557	17.079	59.794
Jakarta Utara	1.419.091	390.397	37.448	114.688	30.260	102.118
Jumlah	8.347.083	2.227.140	101.674	340.687	83.049	291.324

Sumber : bps.jakarta.go.id/asp02/miskin.asp, visited 6 Nopember 2004

Tabel 4 di atas memperlihatkan penurunan tingkat kemiskinan di setiap kotamadya, kecuali di Kepulauan Seribu. Namun tabel tersebut dapat berbicara bahwa kemiskinan masih ada di setiap wilayah Jakarta. Kemiskinan dapat disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor alam dan lingkungan fisik, terbatasnya kesempatan bagi penduduk di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat serta tidak diakuinya hak-hak masyarakat untuk hidup dan berkarya. Kedua, faktor kebudayaan (*culture of poverty*). Ketiga, kemiskinan struktural yaitu akibat keberpihakan elit birokrasi terhadap sekelompok pelaku ekonomi dalam negara seperti pincangnya distribusi hak-hak masyarakat ke akses kebutuhan dasar hidup, simultan dengan itu mereka mempersempit bahkan menindas hak-hak masyarakat marjinal untuk berusaha dan memperoleh hidup yang layak (John Haba dalam Indonesia Menapak Abad 21, 2001).

3.2 Urbanisasi di DKI Jakarta

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, terjadinya arus perpindahan dari desa ke kota karena adanya faktor “pendorong” dan “penarik”. Daya dukung suatu daerah seperti lahan atau potensi lainya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduknya dapat merupakan faktor pendorong seseorang untuk keluar dari daerahnya. Sebaliknya daerah lain yang menjadi tempat tujuan migrasi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk bisa memenuhi kebutuhan merupakan faktor penarik.

Sebagai Ibukota Negara, kota Jakarta menjadi barometer bagi kemajuan perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi yang secara kontinyu terus dilakukan membawa kemajuan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya kegiatan dari berbagai sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, komunikasi, jasa dan lain-lain sebagaimana terlihat dalam Tabel 3. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana perkotaan semakin mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi, lintas perdagangan domestik dan internasional dan pengembangan sumberdaya manusia. Perkembangan fisik dan ekonomi yang berjalan baik ini memicu banyaknya penduduk dari luar wilayah berpindah ke DKI Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan perhitungan sensus penduduk pada tahun 1971, sebanyak 41 persen dari jumlah penduduk Jakarta adalah para pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Keadaan migrasi penduduk seumur hidup yang masuk dan keluar Jakarta pada tahun 1971 s/d 1995 terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Migrasi Seumur Hidup DKI Jakarta Tahun 1971 –1995

Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar
1971	1 791 635	132 215
1980	2 565 128	400 767
1990	3 141 214	1 052 234
1995	3 371 384	1 589 285

Sumber : Supas 1995, BPS

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa migrasi masuk ke Jakarta meningkat terus dari sebesar 1,8 juta jiwa pada tahun 1971 hingga tahun 1995 berlipat hampir dua kalinya menjadi 3,4 juta jiwa. Migrasi keluar pun sejak 1971 hingga 1995 mengalami peningkatan yaitu lebih dari 12 kali. Data di atas tetap menunjukkan bahwa walaupun telah terjadi migran keluar Jakarta, urbanisasi tetap saja setiap tahun terjadi menuju Jakarta.

Kepadatan penduduk secara alamiah sangat erat berkaitan dengan daya dukung lingkungan. Penduduk memerlukan ruang untuk melakukan aktifitasnya. Untuk itu dengan adanya penambahan penduduk yang naik dari tahun ke tahun, pemerintah DKI Jakarta melakukan penambahan luas area daerahnya. Pertambahan area DKI Jakarta yang dilaksanakan 1948 – 1990 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Pertambahan area DKI Jakarta Tahun 1948 –1990

Tahun	Jumlah penduduk (juta)	Area (ha)
1948	2.000.000	20.000
1965	4.000.000	35.000
1980	6.503.000	65.400
1990	8.222.000	66.510

Sumber : www.unu.edu/unupress/unupbooks/uul1ee, visited 5-11-04

Menyadari pertumbuhan penduduk yang terus melaju ini, maka DKI Jakarta melakukan koordinasi pengelolaan pengembangan dan pertumbuhan kota dengan wilayah yang berbatasan dengan Jakarta, yaitu kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Pada pertengahan tahun 1970, koordinasi tersebut membuahkan konsep Jabotabek.

Konsep JABOTABEK ini memiliki *spread effect* terhadap kota-kota di sekitarnya. Firman (1990) menyatakan bahwa bukan hanya kota Jakarta saja yang berkembang pesat, akan tetapi daerah yang menghubungkan kota besar dan pinggiran kota juga menjadi kawasan pengembangan industri. Perkembangan Jakarta tidak lagi berada di pusat kota, tetapi meluas ke wilayah Jawa Barat, Banten, hal ini dicerminkan dari besarnya permintaan tanah di daerah penyangga untuk keperluan industri.

Perkembangan industri di daerah BOTABEK memacu laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini semakin meningkat. Sementara laju pertumbuhan penduduk di Jakarta adalah sebaliknya. Hasil sensus tahun 2000 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan Jakarta hanya sebesar 0,6 %, Kota Bogor sebesar 10,97 %, Kabupaten Tangerang sebesar 4,12 %, Kabupaten Bekasi sebesar 4,7 %, dan Kabupaten Bogor sebesar 2,25 % (Firman, 2001). Hal tersebut menunjukkan adanya pola *extended metropolitan region*. Kawasan inipun menunjukkan kenaikan jumlah migrasi masuk yang paling besar pada tahun 1995.

Data **Migrasi Risen** yaitu *penduduk yang pindah ke Provinsi lain dalam kurun 5 tahun*, menunjukkan adanya kecenderungan migrasi keluar dari Jakarta yang cukup tinggi (Tabel 7).

Tabel 7
Angka Migrasi Risen DKI Jakarta per 1000 Penduduk
Tahun 1980-1995

Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar
1980	115	59
1985	99	58
1990	99	120
1995	65	90

Sumber : Supas 1995, BPS.

Data dalam Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa migrasi masuk ke Jakarta mengalami kecenderungan yang menurun. Sedangkan angka migrasi keluar dari Jakarta

mengalami kecenderungan yang meningkat. Kecenderungan tersebut memberi respon positif terhadap persebaran penduduk dan peluang pertumbuhan ekonomi.

Konsep Jabotabek juga menimbulkan fenomena dalam kependudukan di Jakarta, yaitu adanya gerak penduduk ulang alik (*Commuting*). Gerak penduduk ulang alik yaitu *gerak penduduk dari daerah asal menuju daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga*. Mobilitas ulang-alik jangka waktunya diukur selama enam jam atau lebih (Mantra, 1999). Penduduk Jakarta berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 sebesar 8,4 juta adalah penduduk yang menetap di Jakarta, tidak termasuk penduduk komuter atau pergerakan ulang alik harian dari Bogor, Tangerang, Bekasi ke kota inti Jakarta.

3.3 Kondisi Perumahan dan Permukiman

Mampukah DKI Jakarta mencapai target rencana pencapaian kinerja Deklarasi Millenium dan Deklarasi “*Cities Without Slums Initiative*” yaitu perkotaan yang terbebas dari permukiman kumuh tahun 2020 ?.

Pertambahan penduduk yang meningkat, tingkat kepadatan penduduk, dan lahan yang terbatas menambah agenda DKI Jakarta untuk dapat menyediakan perumahan dan permukiman yang layak bagi penduduknya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pemda DKI melakukan pembangunan pada areal-areal tertentu yang kosong dengan memperhatikan kondisi kawasan, membangun rumah susun untuk menyiasati luas lahan yang sempit. Pemda DKI juga melakukan program penanganan permukiman kumuh melalui :

- ❖ Perbaikan kampung (MHT I, II, III, IV);
- ❖ Realisasi dan pembangunan Rusun sederhana Sewa/Rusunawa;
- ❖ Perumnas;
- ❖ Rusun sederhana (penghuni lama diberi ganti rugi yang cukup untuk pembayaran DP KPR);
- ❖ Pembebasan lahan permukiman oleh swasta dengan multi fungsi penggunaan seperti perumahan, dengan fasilitasnya diharuskan membangun rusun murah sebesar 20% di areal manfaat secara komersil (SK Gub. No. 540/1990); dan
- ❖ Konsolidasi tanah perkotaan.

Selain itu menetapkan pembatasan pembangunan perumahan pada kawasan konservasi atau resapan air. Pengembangan perumahan pada daerah yang berfungsi konservasi (daerah resapan) diarahkan dengan pengembangan secara kolektif dalam bentuk rumah susun dengan tetap mempertahankan Koefisien dasar bangunan rendah per kawasan.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2000, kebutuhan rumah di DKI Jakarta pada tahun 2000 adalah sebanyak 745.543 unit rumah. Dengan perkiraan

kebutuhan rumah dalam kurun waktu 10 tahun, maka setiap tahun diperlukan sebanyak 74.554 unit rumah. Sedangkan kebutuhan rumah setiap tahun akibat pertambahan penduduk dari tahun 2000-2004 sebesar 3.496 unit rumah. Maka prediksi kebutuhan rumah total untuk DKI Jakarta 2004 adalah sebanyak 78.050 unit rumah. Hasil sensus tahun 2000 juga memperlihatkan bahwa di Jakarta terdapat 2.227.140 Rumahtangga dan dari jumlah tersebut hanya 1.242.307 atau sebesar 56 % rumah tangga yang telah memiliki rumah, sedangkan sebesar 44 % belum memiliki rumah. Rumah tangga yang belum memiliki rumah adalah Penggolongan Penguasaan Bangunan: kontrak, sewa, rumah milik orang tua, dan golongan lain.

Umumnya kelompok yang mengalami masalah perumahan di perkotaan adalah kelompok masyarakat miskin dengan pendapatan rendah. Kemiskinan membuat mereka tidak mampu memiliki perumahan yang layak. Lebih lanjut di tengah terjadinya perkembangan kota, berdiri pula perumahan liar dan permukiman kumuh. Berdasarkan data tahun 2000 jumlah lokasi kumuh di DKI Jakarta sebanyak 887 lokasi dengan luasan 1.754 ha atau 2,66 % dari luas total wilayah DKI Jakarta dan dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kekumuhan yang berat (PODES, 2000).

Tumbuhnya perumahan liar dengan cepat di wilayah yang tidak sesuai peruntukannya seperti di wilayah resapan air, di wilayah jalur hijau, atau di daerah aliran sungai (DAS) akan menimbulkan masalah berikutnya. Pembangunan perumahan di bantaran kali sebagai tempat tinggal akan menimbulkan permasalahan ketidakseimbangan ekosistem sungai. Bintarto (1989) mengatakan bahwa ketidakseimbangan wilayah dapat berakibat (1) meluasnya kawasan hunian liar (*slums area*); (2) meningkatnya pelbagai bentuk kriminalitas; (3) makin berkurangnya daya tampung kota dan menurunnya kesadaran lingkungan dan gangguan polusi ; serta (4) meningkatnya sifat individualistik.

Mulculnya wilayah permukiman di bantaran kali akan menimbulkan permasalahan ketidakseimbangan ekosistem sungai. Selain itu secara hukum tinggal dan membangun permukiman di dalam sempadan adalah tidak benar dan membahayakan diri dan keluarga. Akibat yang tampak jelas adalah terjadinya banjir tahunan di beberapa wilayah Jakarta, yaitu setiap sekitar bulan Januari – Februari saat debit air Sungai Ciliwung berada pada titik puncak. Permukiman penduduk di bantaran kali Ciliwung, Jakarta Selatan yang selalu dilanda banjir tahunan adalah Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri dan Kebon Baru. Ironisnya penduduk tetap bertahan dan tetap tinggal di wilayah permukiman tersebut.

Untuk itu diperlukan pemecahan atas permukiman seperti itu, on site atau relokaasi. On site bila mayoritas warga yang harus pindah terikat oleh tempat kerja/sumber pencahariannya, sedangkan relokasi apabila warga yang akan dipindahkan tidak terikat dengan tempat kerja atau tidak tersedia cukup lahan untuk memukimkan kembali warga bantaran kali. Namun demikian masyarakat tersebut diajak untuk menentukan pilihan hunian baru dan dikondisikan agar setelah menerima hunian baru tidak kembali ke tempat asal atau berkumuh ria di tempat lain.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan kawasan tersebut dengan disertai tindakan pengaman teknis yang diperlukan, dan membangun pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat . Tak kalah pentingnya adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, aksesibilitas layanan pembangunan secara adil, adanya kepastian hukum dalam bermukim, serta transparansi. Dengan demikian pembangunan memberikan solusi tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. sosial dan ekonomi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sebagai Ibu Kota Negara, tumbuhnya perekonomian, kelengkapan sarana dan prasarana dan peluang kerja menjadi daya tarik bagi DKI yang menyebabkan penduduk dari wilayah lain terdorong untuk bermigrasi menuju DKI Jakarta. Perpindahan penduduk ini berkontribusi dalam pertumbuhan penduduk DKI Jakarta.

Urbanisasi dapat berlangsung secara ideal, bila kota yang menjadi tujuannya mampu menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan. Kenyataan berbicara lain. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dari kemampuan DKI Jakarta untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan. Disamping itu sebagian migran tidak dibekali dengan pendidikan dan kompetensi yang memadai untuk memasuki dunia kerja di kota ini. Jenis pekerjaan non pertanian membuat sebagian para migran memerlukan waktu untuk beradaptasi. Akibat lebih lanjut mereka memperoleh pendapatan yang relatif rendah.

Lahan yang terbatas, pengelolaan yang belum optimal dan ditunjang dengan daya beli masyarakat yang relatif rendah menjadikan permasalahan perumahan dan permukiman semakin kompleks. Masyarakat menempati tempat tinggal yang belum layak huni dan menetap di permukiman kumuh. Dampak lain tumbuh perumahan liar di wilayah yang berfungsi sebagai jalur hijau, wilayah resapan air, dan daerah aliran sungai (DAS).

Pertumbuhan permukiman liar di daerah kawasan konservasi adalah menyalahi hukum dan membahayakan diri serta keluarga. Pemerintah perlu menangani dengan bijaksana dan melibatkan masyarakat tersebut untuk bersama-sama mencari solusi pemecahannya.

5.2. Saran

Mekanisme dan bentuk pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perlu dibuat dengan mudah.

Hak-hak masyarakat terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman dapat diakses dan transparan.

Sebaiknya masyarakat yang tinggal dibantaran kali atau tempat konservasi ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan atau penyuluhan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto, R. 1987. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Biro Pusat Statistik. 1998. *Statistik Pembangunan Perumahan Indonesia 1997*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.

Biro Pusat Statistik. 1999. *Statistik Pembangunan Perumahan Indonesia 1998*. Hasil Survei Sosial dan Ekonomi 1998. Biro Pusat Statistik. Jakarta.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman. Jakarta.

Firman, T. *Perkembangan Kota dan Wilayah di Jawa*. Kompas, 6 November 1990

Firman, T. *Perkembangan Wilayah Kota Jakarta*. Kompas, 3 Desember 2001

Flanagan, William G., 1883, *Contemporary urban sociology*, Cambridge University press.

Haba John, 2001, "Kemiskinan, Pembangunan dan Masyarakat Marjinal", Muhamad Hisyam (ed), *Indonesia Menapak Abad 21 dalam kajian Sosial dan Budaya, Peradaban*.

Hugo, G. J. 1979. *Migration to and from Jakarta*. Migration and Development in South-East Asia. Oxford University Press

Mantra, Ida Bagus. 1999. *Mobilitas Penduduk Sirkuler*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM

Marbun, BN. 1988. *Proses Pembangunan Desa. Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta : Erlangga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2000. *Agenda 21 Propinsi DKI Jakarta*. Strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

Reksohadiprojo, S. dan A.R. Karseno. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE

Schoorl, JW, 1984. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara=negara Sedang Berkembang*, Gramedia. Jakarta.

Sjahrir, K. 1995. *Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PT Temprint

Sutamihardja, RTM., editor. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Kelas Reguler Program S3. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor.

Tjiptoherijanto, P. *Gerakan Kembali ke Desa*. Prisma, Juni 1994

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1997. *Agenda 21 Indonesia*. Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta

Wiriaatmadja, Soekandar. 1986. *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*. CV. Yasaguna. Jakarta

<http://www.unu.edu/unubooks/uu11ee/uu11ee16.html>. Visited 5 Nopember 2004.

<http://www.unu.edu/unubooks/uu11ee/uu11ee15.html>. Visited 5 Nopember 2004

http://www.kimpraswil.go.id/Dtjen_mukim/ensiklopedia/perumahan/cegahbanjir.htm. Visited 5 Nopember 2004. 5

http://www.suarapublik.org/artikel/rusun_3.htm. visited 6 Nopember 2004.

<http://www.bappedajakarta.go.id/greater.html>. Visited 6 Nopember 2004.

<http://www.ar.itb.ac.id/acara/rural/background.htm>. Visited 11 Nopember 2004.

<http://www.bappedajakarta.go.id/jktbangun/permukiman.html>. Visited 11 Nopember 2004.

